

RINGKASAN

Galang Rambu Anarki, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2015, HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN, Dr.Abdul Rachmad Budiono, SH.MH, Rachmi Sulistyarini, SH.MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan akta kelahiran, sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa status anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, bagaimana jika ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan? Anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada kenyataannya memang kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran, Kantor Catatan Sipil tidak membuat akta kelahiran dikarenakan status orang tuanya yang tidak jelas. Maka dari itu Pasal 55 menjelaskan lebih lanjut apabila anak tidak mempunyai akta kelahiran, si orang tua dapat melakukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa adanya pertentangan hukum dalam penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda (diterima) dan Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda (ditolak), karena dalam penetapan tersebut sama-sama mengajukan permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tapi diputus berbeda oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga menimbulkan perbedaan hak bagi si anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan akta kelahiran?

Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan berupa akta kelahiran, tetapi harus diberikan kepada anak, tetapi tidak serta merta langsung diberikan pada saat kelahiran, ada proses yang harus dipenuhi oleh orang tua si anak, yaitu memenuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yaitu orang tua si anak harus memberikan bukti-bukti yang memenuhi syarat sehingga permohonannya diterima, bukti-bukti yang memenuhi syarat sesuai penetapan yang diteliti oleh penulis antara lain ; KTP suami isteri, Kartu Keluarga orang tua si anak, Surat Kelahiran dan Keterangan Kelahiran, bukti Akta Nikah si Pemohon, dan apabila ada salah satu suami atau isteri masih terikat perkawinan dengan pihak lain harus segera medaftarkan akta cerainya sebelum melakukan perkawinan lagi.

Keyword : Perkawinan, hak asasi manusia, Anak luar kawin, akta kelahiran, penetapan



SUMMARY

Galang Rambu Anarki, Private Law, Faculty of Law, University of Brawijaya Malang City, Mei 2015, Status Of Children Born Of The Marriage Is Not Recorded In Efforts To Get Birth Certificate, Dr.Abdul Rachmad Budiono, SH.MS, Rachmi Sulistyariini, SH.MH

In this paper, the authors raised the issue concerning the rights of children born out of marriage that is not recorded in obtaining a birth certificate, as in article 55 of Law No. 1 of 1974 About the status of child marriage that can only be proven by a birth certificate, what if there is a child born of a marriage that is not listed? Children born out of marriage that is not recorded in reality it is difficult to obtain a birth certificate, the Civil Registry Office does not make a birth certificate because of the status of their parents are not obvious. Therefore Article 55 further explain if the child does not have a birth certificate, the parents can make application for the determination of the origin of the child to the Islamic Court with the evidence that qualifies. In this case the authors assume that the legal conflict in the determination of No. 0268 / Pdt.P / 2014 / PA.Sda (acceptable) and Decision No. 0042 / Pdt.P / 2014 / PA.Sda (rejected), because in the same-determination the same applied for the origin of a child born of a marriage that is not recorded but cut differently by the Religious Courts Sidoarjo, giving rise to differences in the rights of the child.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem is how the rights of children born out of marriage that is not recorded in obtaining a birth certificate?

Then the authors of this paper use normative juridical method to approach law (statute approach), the approach of the case (case approach), and the approach to the analysis (analytical approach). Primary and secondary legal materials were obtained by the author analyzed using qualitative descriptive technique.

Based on the research results, the rights of children born out of marriage is not recorded in the form of a birth certificate, it must be given to the child, but not necessarily directly given at birth, there is a process that must be met by the child's parents, ie comply with the rules mentioned in article 55 of the Marriage Act that the child's parents must provide evidence to qualify so that his application is accepted, the evidence suitably qualified establishment studied by the author, among others; KTP spouses, family card the child's parents, Letters and Press Releases Birth Birth, Marriage Certificate evidence of the Applicant, and if one of the spouses is still married to the other party must immediately medatarkan divorce certificate before mating again.

Keyword : marriage, human rights, children outer mating, birth certificates, determination

